

# **KERJASAMA INDONESIA DAN KOREA SELATAN DALAM BIDANG TRANSFER TEKNOLOGI PERTAHANAN KEAMANAN**

**Yudha Permana<sup>1</sup>**

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

## **ABSTRACT**

*Cooperation between Indonesia and South Korea in the field of defense and security technology transfer is one of the strategic efforts taken by the two countries to strengthen their respective defense capacities. In recent years, the two countries have carried out various initiatives involving technology transfer in the defense and security sector, in the form of industrial cooperation, research and training. This collaboration focuses on developing and modernizing military equipment, increasing personnel capabilities, and utilizing advanced technology in the fields of intelligence and communications. Indonesia, which is trying to increase independence in the defense industry, sees South Korea as a strategic partner that has the latest defense technology and experience in developing modern defense systems. On the other hand, South Korea also benefits from Indonesia's large and stable market as an important region in Southeast Asia. This article aims to analyze the dynamics of this collaboration, assess its impact on strengthening Indonesia's defense sector, and explore the challenges and opportunities that exist in the transfer of defense technology between the two countries. By utilizing policy analysis and case studies, it is hoped that this research can provide a deeper understanding of the potential and challenges in international cooperation in the field of defense and security.*

**Keywords:** *Indonesia-South Korea cooperation, technology transfer, defense and security, defense industry, Southeast Asia.*

## **ABSTRAK**

Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam bidang transfer teknologi pertahanan keamanan merupakan salah satu upaya strategis yang diambil oleh kedua negara untuk memperkuat kapasitas pertahanan masing-masing. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua negara telah melakukan berbagai inisiatif yang melibatkan transfer teknologi dalam sektor pertahanan dan keamanan, baik dalam bentuk kerja sama industri, riset, maupun pelatihan. Kerjasama ini berfokus pada pengembangan dan modernisasi peralatan militer, peningkatan kemampuan personel, serta pemanfaatan teknologi canggih dalam bidang intelijen dan komunikasi. Indonesia, yang tengah berusaha meningkatkan kemandirian dalam industri pertahanan, melihat Korea Selatan sebagai mitra strategis yang memiliki teknologi pertahanan mutakhir dan pengalaman dalam pengembangan sistem pertahanan modern. Di sisi lain, Korea Selatan juga memperoleh manfaat dari pasar Indonesia yang besar dan stabil sebagai kawasan penting di Asia Tenggara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kerjasama tersebut, menilai dampaknya terhadap penguatan sektor pertahanan Indonesia, serta menggali tantangan dan peluang yang ada dalam transfer teknologi pertahanan antara kedua negara. Dengan memanfaatkan analisis kebijakan dan studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang potensi dan tantangan dalam kerjasama internasional di bidang pertahanan dan keamanan.

**Kata kunci:** *Kerjasama Indonesia-Korea Selatan, transfer teknologi, pertahanan keamanan, industri pertahanan, Asia Tenggara.*

## PENDAHULUAN

Dilihat dari postur pertahanan Indonesia melalui *Global Fire Power* Indonesia memang menempati posisi 16 dari 140 negara, akan tetapi hal tersebut tidak lepas dari banyaknya prajurit yang dimiliki Indonesia yaitu sebanyak, 400.000 prajurit aktif dan juga 400.000 prajurit cadangan, akan tetapi postur pertahanan tidak dilihat dari prajurit saja, melainkan dari aspek-aspek lain (Sudira, Kartasasmita, Syawfi, & Dewi, 2022). Memang Indonesia memiliki ranking yang cukup meyakinkan apabila dilihat dari *global fire power 0.2684*, akan tetapi Indonesia memiliki banyak kelemahan terutama dalam alutsista dimana Indonesia belum memiliki *aircraft carrier, helicopter carrier, dan destroyer warship*. Dilihat dari permasalahan yang ada Indonesia memiliki masalah yang selama ini sudah mengakar khususnya dalam sistem pertahanan yaitu masalah alutsista. Di mana sistem pertahanan Indonesia sempat mengalami goncangan khususnya pada saat dekade 90-an khususnya di akhir-akhir masa orde baru pada masa itu Indonesia sedang dihadapkan masalah disintegrasi dengan Timor Timur. Indonesia pada masa itu mengambil tindakan represif dan menimbulkan banyak kecaman karena dianggap melanggar hak asasi manusia, tak terkecuali Amerika Serikat yang dianggap sebagai polisi dunia bertindak untuk mengembargo pasokan di bidang militer, selain itu Indonesia sedang mengalami krisis keuangan yang semakin berdampak kepada bidang-bidang lain juga berdampak kepada sistem pertahanan (Departemen Pertahanan RI, 2015).

Embargo Amerika Serikat di bidang pertahanan memperlihatkan bahwa Indonesia tidak bisa terus bergantung kepada Amerika Serikat. Oleh karena itu, kerjasama dengan Korea Selatan menjadi dianggap perlu karena hubungan kedua negara sudah berlangsung lama, Indonesia dan Korea Selatan secara resmi menjalin hubungan Diplomatik pada 17 September 1973. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi Korea Selatan pada saat APEC Summit di bulan November 2005. Pada Desember 2006 Presiden Roh Moo Hyun mengunjungi Indonesia untuk menandatangani Persekutuan Strategis Bersama antara Indonesia dengan Korea Selatan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi Korea Selatan sebagai tamu negara pada bulan Maret 2012 dan Presiden Lee Myung-bak pergi ke Indonesia untuk menghadiri *Bali Democracy Forum* di bulan November 2012 (Kompas.com, 2021). Di samping banyaknya saling kunjung dari para pejabat tinggi seperti para Menteri, Ketua dan Anggota Parlemen, Dirjen, Direktur dan para pejabat tinggi lainnya termasuk pula rombongan/misi-misi dagang. Saling kunjung ini merupakan salah satu indikator betapa baiknya hubungan kedua negara yang hingga saat ini masih tetap dapat dipelihara dengan baik

## KERANGKA ANALITIK

Kerangka analitik yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan neo-realisme sebagai pisau analisis utama. Pemikiran Neorealisme merupakan sebuah perspektif dalam ilmu hubungan internasional yang dikemukakan oleh Kenneth Waltz melalui bukunya "*Theory of International Politics*" yang lahir pada 1979. Dalam buku tersebut Waltz, Dunia internasional berada dalam hubungan yang sistemik, dimana perilaku dan kebijakan dari sebuah negara dipengaruhi oleh sistem internasional, baik itu langsung maupun secara tidak

langsung. Sementara itu menurut Hans Morgenthau, Reinold Niebuhr, dan E.H.Carr neorealisme merupakan pengembangan dari perspektif realis klasik dan menjadi ilmu sosial yang teliti dan positivistik (Jackson & Sorensen, 2014, pp. 136-137). Konsep dasar yang dimiliki oleh Kenneth Waltz mempunyai aspek yang normatif, salah satu contohnya Waltz mulai bergerak dari konsep kedaulatan negara. Waltz berpendapat bahwa negara berdaulat harus tegas untuk menentukan keinginannya sendiri khususnya pada situasi negara dalam menghadapi masalah-masalah internal maupun eksternal. Maka kedaulatan negara berarti sebuah kondisi yang mempunyai ciri dengan istilah kemerdekaan, diantaranya; negara yang memiliki kedaulatan secara formal tidak boleh memiliki alasan untuk memerintah satu sama lain, dan tidak ada yang perlu patuh satu sama lain. Jadi setiap negara memiliki hak untuk memperjuangkan nilai-nilai keamanan dan kelangsungan hidupnya masing-masing (Jackson & Sorensen, 2014, p. 140).

Serta penggunaan konsep-konsep turunan lainnya, yakni Kepentingan Nasional menurut Donald E. Nuechterlein dan Kerjasama Internasional menurut K.J Holsti. Serta, konsep diplomasi pertahanan untuk memberikan penjelasan secara kritis mengenai fenomena permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, yang memiliki tujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat peneliti meneliti apakah ada hubungan antar variabel yang ada.. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menggunakan berbagai sumber yang relevan dan kredibel. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan keakuratan hasil.

## **PEMBAHASAN**

Kerjasama pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan sistem pertahanan sebuah negara menjadi sangat penting khususnya dalam percaturan dunia internasional selain itu dalam rangka *survive* dalam keadaan dunia internasional yang anarki. Modernisasi sistem pertahanan Indonesia menjadi sangat mendesak karena banyak negara yang sudah mengupgrade sistem pertahanannya, setiap negara diharuskan selalu *update* dalam memperbaharui sistem pertahanan tidak selalu tentang alutsista akan tetapi juga dari dua sisi yaitu sisi militer dan nirmiliter. Tuntutan tersebut mengharuskan Indonesia sebagai negara kepulauan dan juga memiliki 3 jenis perbatasan yang berbeda mengharuskan Indonesia untuk senantiasa terus memodernisasi sistem pertahanannya.

### **A. Kepentingan Nasional Indonesia dalam Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Korea Selatan**

Kurangnya pemanfaatan industri pertahanan dan juga kecenderungan Indonesia untuk konsumtif dalam pembelian Alpalhankam membuat kualitas sistem pertahanan Indonesia kurang begitu kuat khususnya dalam teknologi karena Indonesia. Indonesia sendiri sudah mengeluarkan UU NO 16 tahun 2012 untuk pemanfaatan industri pertahanan dan mengeluarkan kebijakan *Minimum Essential Force* untuk pemenuhan kebutuhan Alutsista dari Indonesia. Diharapkan dengan adanya kedua kebijakan tersebut ketertinggalan Indonesia di bidang Alpalhankam baik dari negara-negara kawasan maupun dunia.

Berdasarkan Kepentingan Nasional Indonesia yang sudah disampaikan sebelumnya dan juga yang sudah disampaikan dalam kebijakan Rencana Strategis Indonesia 2018 di bidang pertahanan. Indonesia melaksanakan kerjasama pertahanan dengan Korea Selatan yang dipilih karena memang telah lama sejak tahun 90-an sudah menjalin kerjasama, dan mulai inten bekerjasama di berbagai bidang khususnya pertahanan sejak ditandatanganinya *Memorandum of Understanding Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century*, kerjasama tersebut berlanjut dan mulai ditandatanganinya *Memorandum of Understanding Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan di bidang pertahanan* pada tahun 2013. Selepas penandatanganan tersebut kerjasama pertahanan Indonesia dan Korea Selatan semakin intens dan terus berlanjut hingga dewasa ini.

Donald E Nuechterlein melihat bahwa kepentingan nasional adalah sebuah kepentingan yang dirasa perlu serta diinginkan bagi setiap negara yang memiliki kedaulatan mencakup pula wilayah luar negaranya. Sebenarnya ada empat jenis kepentingan nasional menurut Nuechterlein, akan tetapi peneliti tidak melihat adanya kecocokan di antara dua jenis lain, dan hanya melihat kecocokan dalam kerjasama ini yang bisa dicapai Indonesia yaitu hanya dalam *defense Interest* dan juga *Economic Interest* dimana (Bakrie, 1999, pp. 60-64):

1. *Defense Interest* (Kepentingan Pertahanan), berkaitan dengan kepentingan bagi setiap negaranya dalam perlindungan warga negara, beserta sistem politik dari negara tersebut dari ancaman luar. Dan dalam penelitian ini kepentingan nasional Indonesia di bidang pertahanan dapat tercapai khususnya dalam pemenuhan kekuatan minimum TNI, membangun kemandirian industri pertahanan kemampuan Indonesia dalam menjaga ALKI serta perbatasan dari ancaman kedaulatan sesuai dengan rencana strategis Kebijakan pertahanan Indonesia tahun 2018, serta membantu *capacity building* dengan beberapa kunjungan antara kedua belah pihak. Pembangunan sistem pertahanan yang kuat tentunya juga berguna dalam *deterrence power*.
2. *Economic interest* (Kepentingan perekonomian), berkaitan dengan kesejahteraan khususnya dalam peningkatan perekonomian, pembangunan. Peningkatan diwujudkan melalui kerjasama ekonomi dengan negara lain.

Dari segi *economic Interest* dapat dilihat dari sisi industri pertahanan khususnya PT Pal sebagai penerima alih teknologi dari DSME dalam pembuatan *Landing Platform Dock* yang dilaksanakan pada 2010-an dan baru mendapatkan lisensi pada 2019. Pemberian lisensi tersebut sudah jelas selain membantu perkembangan industri pertahanan juga membantu ekonomi Indonesia khususnya dalam penjualan alutsista dengan negara lain, tercatat Philipina sebagai negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang memesan LPD buatan PT Pal. Dalam kasus ini Indonesia sendiri sudah diberi lisensi oleh Korea Selatan pada 2019 lalu dan sudah terbukti

LPD Makassar class buatan Indonesia cukup laku di pasar internasional bahkan mulai terbukti kualitasnya dan bisa dibandingkan dengan sang pemberi alih teknologi yaitu korea selatan. Contohnya nyatanya yaitu dua negara tetangga kita yaitu Philipina sudah mulai membeli LPD buatan PT pal untuk sistem pertahanannya.

Implikasi dari tercapainya kepentingan nasional dapat dijabarkan melalui Teori yang dikemukakan Donald E Nuechterlein mengenai empat jenis Kepentingan Nasional peneliti melihat bahwa dalam penelitian yang dilaksanakan peneliti hanya memenuhi dua aspek yaitu *Defense Interest* dan juga *Economic Interest*, *Defense Interest* indonesia akan mencapai kepentingan nasionalnya di antara pemenuhan MEF, ALKI, Serta pembangunan industri pertahanan, dari segi *Economic Interest* Indonesia dapat memanfaatkan kerjasama industri pertahanan dengan diberikannya Lisensi kepada Indonesia. Dengan diberikannya lisensi indonesia menjadi berhak menjual alutsista(dalam kerjasama pembuatan LPD) Ke negara lain dan sudah jelas bahwa hasil penjualannya sangat membantu kepada perekonomian indonesia khususnya kemajuan industri pertahanan tanah air kedepannya.

## **B. Diplomasi Pertahanan Indonesia dan Korea Selatan**

Diplomasi pertahanan dimaksudkan untuk menemukan keseimbangan antara kebutuhan dalam menciptakan stabilitas keamanan di kawasan regional, meningkatkan kapabilitas pertahanan, serta kemandirian pertahanan. Diplomasi pertahanan adalah penggunaan upaya yang dilaksanakan negara untuk mencapai kepentingan nasional pertahanan lewat instrumen diplomasi dimulai dari kontrak, kerjasama, kemitraan, sampai perumusan dengan negara lain. sama halnya penelitian yang dibahas oleh peneliti yaitu mengenai kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan di bidang pertahanan 2015-2020. Kerjasama diplomasi antar dua negara atau biasa disebut diplomasi bilateral memiliki peran penting dalam mencapai kepentingan nasional sebuah negara. Menurut Idil Syawfi dalam tesisnya yang berjudul “Aktivitas Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pemenuhan Tujuan-tujuan Pertahanan Indonesia (2003-2008)” mengemukakan bahwa tiga karakter dari diplomasi pertahanan diplomasi pertahanan diantaranya (Syawfi, 2009, p. 14):

1. ***Defence Diplomacy for Confidence Building Measure***, menjadi salah satu cara Peningkatan hubungan antar negara baik melalui diplomasi dalam konteks *Confidence Building* akan berimplikasi kepada kondisi moral yang baik dalam hubungan antar negara. sehingga menghilangkan mispersepsi dan saling percaya satu sama lain (Syawfi, 2009). Berapa diantaranya adalah kunjungan kenegaraan, dialog dan konsultasi, saling tukar informasi strategis, pembatasan kapabilitas pertahanan, deklarasi kerjasama strategis, pertukaran perwira, pendidikan militer, kesepakatan hubungan baik, dan latihan militer bersama.

Melihat adanya peluang kerjasama dengan negara lain khususnya dalam kerjasama militer non perang, Indonesia melaksanakan beberapa kerjasama di bidang CBM dengan Korea Selatan, tujuannya untuk memperkuat sistem pertahanan kedua negara. Kemitraan strategis Indonesia dan Korea Selatan di bidang pertahanan juga menjalar ke arah kerjasama dalam pengembangan

bersama prajurit militer masing masing negara. Pada 2015 korea selatan memberikan penghargaan tanda jasa kepada Kasal atau kepala staf angkatan laut Laksamana TNI Ade Supandi dianugerahi bintang Bintang Jasa Tong-II oleh kepala staf *Republik of Korea Navy admiral* Jong Ho Sub. Pemberian tanda jasa tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya pemerintah Korea Selatan melalui *ROK Navy* menilai jenderal laksamana TNI Ade Supandi sudah berkontribusi dalam menjaga perdamaian laut baik di lingkungan kawasan maupun dunia. Pemberian tersebut memperkuat hubungan kerjasama antara kedua negara khususnya di bidang pertahanan, ditambah lagi Indonesia sedang dalam tahap penerimaan tiga kapal selam jenis 209 dari Korea Selatan (Kompas.com, 2021).

Pertukaran informasi strategis tentunya dapat menguntungkan kedua negara khususnya dalam menutupi kekurangan dari militer masing-masing negara, selain pembangunan hubungan baik dari pemberian lencana kepada KASAL dan kunjungan Akademi militer ROKArmy dan Akademi Militer dapat berlanjut ke kerjasama yang lebih serius seperti latihan gabungan/ Latihan militer Bersama guna membangun sistem pertahanan yang kuat kedepannya.

2. ***Defence Diplomacy for Defense Capabilities***, kebutuhan Indonesia dalam pemenuhan Minimum Essential Force, urgensi dalam perlindungan Arus Laut Kepulauan Indonesia serta membangun industri pertahanan yang mandiri dapat terpenuhi dengan kerjasama Indonesia dan Korea Selatan di bidang pertahanan 2015-2020. Kebutuhan akan sistem pertahanan dapat dipenuhi dengan kegiatan diplomasi pertahanan untuk *defense capabilities* yang memiliki definisi Penyelenggaraan diplomasi pertahanan ini memiliki tujuan utama dalam meningkatkan kapabilitas pertahanan secara material. instrumen dalam penelitian melibatkan faktor eksternal dengan tujuan utamanya mempersiapkan sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman potensial dari luar. Beberapa contoh kegiatan *Defense Capabilities* menurut Idil Syawfi (Syawfi, 2009), yaitu usaha-usaha kerjasama strategis menyangkut dalam hal bantuan militer; pembelian alutsista dan kredit ekspor; usaha kerjasama dalam pembangunan pangkalan militer; dan pemberian perlindungan dari negara adidaya kepada negara berkembang.

Indonesia mengadakan kerjasama pengadaan tiga kapal selam dengan Korea Selatan pada tahun 2011, Memorandum of Understanding pun ditandatangani . Pemerintah Indonesia sendiri melalui kementerian pertahanan menunjuk PT PAL Indonesia sebagai pelaksana kerjasama sementara serta *DAPA (Defense Acquisition Program Administration)* menunjuk *PT Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME)* Sebagai pemasok dari pengadaan 3 kapal selam di antara kedua negara. Kontrak kerjasama sendiri bernilai \$1.1 Miliar (Merdeka.com, n.d.). Perlu diketahui pengadaan tiga kapal selam ini dibagi menjadi dua konsep yang pertama indonesia hanya membeli saja, 2 kapal selam langsung didatangkan dari korea dan yang kedua 1 kapal selam akan dilaksanakan dengan konsep *Transfer of Technology* (Kompas.com, 2017).

Kedua Indonesia kembali kerjasama dengan Korea Selatan yang dianggap sebagai salah satu produsen alpalhankam terbesar di dunia yaitu Korea Selatan. Indonesia berencana mendatangkan kembali pesawat tipe training aircraft yang diberi nama KT-1 *Woong Bee* pesawat latih ini biasa digunakan dalam acara memperingati hari-hari besar karena ukurannya yang cukup kecil dan biasa digunakan untuk berakrobatik, buatan tahun 1991 dibuat oleh PT *Korea Aerospace Industry* dan diproduksi massal tahun 1999. Dengan memiliki Panjang 10.2 meter, lebar sayap 10.6 meter, tinggi 3.6 meter serta berat kosong 1.91 ton. Pesawat ini selain bisa digunakan untuk akrobat di hari hari besar, juga sangat berguna dalam tugas serangan ringan apabila dipasangkan senjata. Indonesia sendiri membeli 12 pesawat KT-1B pada tahun 2006 dari korea selatan dan digunakan sebagai pesawat latihan dari pilot tempur Indonesia sebelum menggunakan pesawat tempur lain yang lebih canggih seperti pesawat Sukhoi maupun F-16, F-15, SU-30, maupun pesawat T-50i golden eagle.<sup>1</sup> KT-1B *Woong bee* didatangkan sebagai pengganti pesawat latih T-34 Charlie yang sudah lama beroperasi atau uzur, meskipun pada dasarnya digunakan sebagai pesawat latih dasar, *Woong Bee* memiliki beberapa kelebihan yaitu; instrumen kokpit yang sudah terintegrasi antara sistem analog dan digital sedangkan sistem avionic didukung teknologi *EHSI (Electronic Horizontal Situation Indicator)*, *EADI (Electronic Attitude Director Indicator)*, *EEL, AHRS (Attitude Heading Reference System)*, dan radio UHF/VHF.

Dua kerjasama bidang pertahanan yang disebutkan sebelumnya juga termasuk dalam upaya pemenuhan *Minimum Essential Force* yang akan masuk tahap ketiga dan merupakan tahap terakhir, dimana dalam kebijakan strategis pertahanan Indonesia 2018. Indonesia harus segera memenuhi minimum kebutuhan pertahanannya. Karena di tahun 2025-2029 Indonesia harus dapat memenuhi kebutuhan pertahanannya melalui industri pertahanan dalam negeri sesuai dengan undang-undang no 16 tahun 2012.

3. ***Defense Diplomacy for defense industry***, kerjasama industri pertahanan menurut Idil Syawfi sendiri adalah dimana kerjasama ini dilakukan dalam rangka pembangunan dan pematangan industri domestik di bidang pertahanan sebuah negara. perkembangan industri pertahanan suatu negara dapat mengurangi dampak ketergantungan politik dan ekonomi khususnya anggaran pengadaan alutsista dalam rangka meningkatkan kapabilitas militer (Syawfi, 2009), beberapa contoh kegiatannya adalah kerjasama strategis antara kedua negara dalam hal yang bersangkutan dengan produksi senjata; kerjasama strategis antar negara; berkaitan pada pengembangan dalam penelitian persenjataan; pemberian lisensi; investasi di bidang industry pertahanan; dan aktivitas *transfer of technology*. Kerjasama yang pertama adalah dalam pengadaan pesawat tempur dengan Korea Selatan Kerjasama pengadaan Pesawat tempur yang pada masa awal disebut

---

<sup>1</sup> Indra Nurrohman, Dadang Gunawan, Sutrimo Sumarlan. PERAN DIPLOMASI PERTAHANAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA PROGRAM KFX/IFX INDONESIA-KOREA SELATAN. Jurnal Diplomasi Pertahanan. Vol 5. Universitas Pertahanan.

dengan *Korea Fighter X*, Indonesia dan Korea Selatan sepakat bekerja sama dalam pengadaan pesawat terbang jet tempur dengan konsep *transfer of technology*, seperti yang kita ketahui pesawat ini merupakan pengembangan dari pesawat buatan amerika yaitu f 35. Korea sendiri sudah mendapatkan izin dalam lisensi pembuatan pesawat jet tempur ini.

Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam pengadaan pesawat yang sudah diberi nama KF Boramae, kerjasama sendiri ditandatangani pada 15 juli 2009 kedua negara menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* mengenai kerjasama pengembangan tempur KF-X yang dilanjutkan dengan *technology development phase*. Pada tahun 2011 kerjasama indonesia dan Korea Selatan dimulai dengan tiga tahap yaitu; pertama Tahap *Technology Development (TD Phase)*, kedua Tahap *Engineering and Manufacturing Development (EMD Phase)* 3. Ketiga *Tahap Production* (Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, 2019).

Badan Penelitian Kementerian pertahanan menunjuk PT Dirgantara Indonesia sebagai pelaksana(*lead integrator*) kerjasama pembuatan jet tempur *KF-X* serta DAPA (*Defense Acquisition Program Administration*) menunjuk PT *Korea Aerospace Industries* sebagai pelaksana pembuatan jet tempur *KF-X*. pembagian dana pengembangan jet tempur sendiri dibagi 80% dibayar korea selatan dan 20% dibayarkan Indonesia. Indonesia sendiri harus membayar sebesar US\$ 6-8 Miliar (Kompas.com, 2019).<sup>2</sup> Indonesia dan Korea Selatan sendiri membuat *Combined Research and Development Center (CRDC)* dalam rangka *transfer of Technology*.

Kerjasama yang kedua adalah kerjasama pengadaan 3 kapal selam *changbogo class* 209/1400 buatan jerman yang dilisensikan kepada Korea Selatan, yang dimana 2 kapal selam didatangkan langsung dari Korea Selatan dan 1 kapal Selam dilakukan dengan konsep *Transfer of Technology* Korea Selatan dipilih melalui banyak pertimbangan dari Pemerintah Indonesia dalam pengadaan kapal selam tersebut, belum lagi ada beberapa tawaran menarik dari Jerman, Perancis dan Rusia dalam pengadaan kapal selam tersebut, akan tetapi Indonesia tetap berkomitmen untuk bekerjasama dengan Korea Selatan karena beberapa pertimbangan khususnya hubungan baik yang sudah terjalin cukup lama. Selain itu kerjasama Pemilihan dengan Korea Selatan juga sesuai dengan kaidah Undang-undang No 16 tahun 2012 mengenai adanya timbal balik atau *defense offset* dari negara produsen.

Memorandum of Understanding pun ditandatangani pada tahun 2011. Pemerintah Indonesia sendiri melalui kementerian pertahanan menunjuk PT PAL Indonesia sebagai pelaksana kerjasama(*Lead Integrator*) sementara serta DAPA (*Defense Acquisition Program Administration*) menunjuk PT *Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME)* Sebagai pemasok dari pengadaan 3

---

<sup>2</sup> Kompas.com. Proyek Pesawat Tempur KF-X dan Hegemoni Teknologi Korsel atas Indonesia diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/18/15403971/proyek-pesawat-tempur-kf-x-dan-hegemoni-teknologi-korsel-atas-indonesia?page=all>.

kapal selam di antara kedua negara. Kontrak kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam pengadaan 3 Kapal Selam *changbogo class* 209/1400 sendiri.

Kerjasama dibahas sebelumnya yaitu kerjasama pengadaan pesawat KFX/IFX, kerjasama pengadaan kapal selam *Changbogo Class*, dan juga pemberian lisensi atas kerjasama pengadaan LPD *Makassar Class* merupakan kerjasama *defence diplomacy for defense Industry* karena ketiga kerjasama tersebut sudah memenuhi 3 dari 5 aktivitas kerjasama defense industry menurut Idil Syawfi diantaranya Kerjasama yang dilaksanakan PT PAL Indonesia dan PT Dirgantara Indonesia dengan KAI dan PT DSME merupakan kerjasama pertahanan dengan aktivitas *Transfer of Technology* karena Indonesia mendapatkan alih teknologi daripada Korea Selatan dalam pengembangan Sumber daya Manusia industri pertahanan dalam negeri. Selain itu dalam kerjasama pengadaan kapal selam Pemerintah juga melakukan Investasi di bidang industri pertahanan yaitu Pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan Fasilitas produksi Kapal Selam diperoleh PT PAL melalui skema Penyertaan Modal Negara. Dan yang terakhir Indonesia juga mendapatkan lisensi dari Korea Selatan khususnya sebagai lead integrator PT PAL mendapatkan lisensi dari PT *Daesun Shipbuilding and Engineering*, dimana pemberian lisensi merupakan bagian dari kerjasama industri pertahanan antar negara menurut Idil Syawfi.

Dari beberapa data yang peneliti jabarkan diatas dapat dilihat bahwa kontribusi dari kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan cukup penting dalam membantu memperkuat perkembangan sistem pertahanan Indonesia. Selain itu kerjasama Indonesia dan Korea Selatan jawaban atas berikut merupakan beberapa kontribusi kerjasama pertahanan Indonesia dan Korea Selatan terhadap kepentingan nasional Indonesia di bidang pertahanan diantaranya;

1. Tercapainya 1 dari tujuh program prioritas industri pertahanan nasional melalui kerjasama pengadaan kapal selam *Changbogo Class* 209/1400, kapal selam sendiri dijadikan prioritas karena dianggap sebagai alutsista yang memiliki tingkat teknologi tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari dipenuhinya 60 persen pemenuhan MEF periode dua dari target awal 62 persen dalam 5 tahun terakhir. Dimana didalamnya ada kerjasama pengadaan kapal selam, pesawat tempur, dan pesawat *trainee Aircraft*.
2. Selain itu melalui kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam pemberian lisensi terhadap produk kerjasama *Landing Platform dock* juga menguntungkan Indonesia yaitu dalam segi ekspor dimana Indonesia sendiri telah mengekspor LPD pesanan Filipina yang diberi nama *Makassar Class*.

Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan selain memberikan beberapa kontribusi terhadap sistem pertahanan dalam negeri, akan tetapi juga memberikan beberapa problem yang seharusnya bisa untuk dipecahkan kedepannya, beberapa problem atau masalah dalam kerjasama Indonesia dan Korea Selatan tersebut diantaranya:

1. Masalah anggaran belanja pertahanan yang kurang dari 30 persen, perlu diketahui apabila negara-negara industri pertahanan mengalokasikan anggaran belanja pertahanannya sebesar 30 persen untuk pengembangan industri pertahanannya. Akan tetapi Indonesia

sendiri pada tahun 2020 kurang dari 25 persen yaitu anggaran Rp 34,62 Triliun atau sekitar 25,3 persen.

2. Anggaran belanja pertahanan yang tidak sesuai berimplikasi kepada capaian sasaran pokok bidang pertahanan dan keamanan, dimana tahun 2020 pencapaian target seharusnya mencapai 49 persen akan tetapi hanya tercapai 35,9 persen. Hal tersebut tidak lepas dari mandeknya kerjasama pesawat jet tempur dengan korea.
3. Kecenderungan impor alutsista yang meningkat selama lima tahun terakhir, selain itu juga ekspor industri pertahanan mengalami penurunan meskipun tahun 2016-2017 stabil akan tetapi tahun 2018-2020 ekspor industri pertahanan terus mengalami penurunan.
4. Adanya broker dalam pengadaan alutsista justru memperkeruh kebutuhan alutsista MEF indonesia kedepannya.

Masalah yang dihadapi dalam kerjasama pengadaan pesawat dimana pihak Indonesia menurut hubungan internasional sendiri khususnya dalam kerjasama pertahanan dan keamanan dijelaskan melalui adanya konsep *Relative gains* yaitu keadaan dimana sistem Internasional yang anarki mengakibatkan negara lebih memperhatikan keuntungan relatif daripada keuntungan yang absolut. Selain itu Relative Gains yaitu Dimana keuntungan relatif secara dramatis memperlambat kerjasama bagi sebuah negara, karena mempertimbangkan tidak hanya apakah satu pihak memperoleh apa yang diinginkan, akan tetapi lebih penting bagi salah satu pihak apakah keuntungan tersebut lebih besar daripada pihak lain, yang dimana dalam dunia internasional yang anarki harus dilihat sebagai musuh potensial. Keadaan relative gains dimana Indonesia meminta mengadakan renegotiasi karena beberapa hal, keraguan indonesia juga memikirkan tentang bagaimana keuntungan dari kerjasama, pihak indonesia sendiri merasa kurang diuntungkan dengan uang yang dikeluarkan, meskipun indonesia hanya membayar 20 persen pengembangan alutsista.

Kontribusi dan masalah yang hadir dalam kerjasama Indonesia dan Korea Selatan di bidang pertahanan. Di sisi masalah sendiri peneliti memberikan saran dimana Indonesia kedepannya harus lebih serius dalam penganggaran belanja pertahanan kedepannya, khususnya dalam mencapai master plan kemandirian industri pertahanan. Anggaran tersebut tentunya akan berimplikasi meningkatnya ekspor karena industri pertahanan dapat mengembangkan dan memproduksi lebih banyak alpanhankan. Indonesia juga harus lebih selektif dalam kerjasama pengadaan alutsista yang berkiblat kepada kebutuhan MEF serta sesuai dengan UU no 16 tahun 2012, dan melihat kerjasama yang paling menguntungkan bagi indonesia, tidak mengikuti keinginan broker-broker yang justru merugikan Indonesia kedepannya, dan terakhir Indonesia sendiri harus lebih serius dalam pengawasan jalanya Transfer of Technology pesawat tempur KFX serta pengawasan untuk mendapatkan lisensi baik untuk pesawat KFX maupun untuk Kapal Selam.

## **KESIMPULAN**

Kerjasama kedua negara memang kontribusi, meskipun tidak terlalu signifikan akan tetapi kontribusi dari kerjasama dua negara di bidang pertahanan mampu untuk mendukung kebutuhan sistem pertahanan dari segi teknologi, Sumber daya manusia, Maupun dari segi ekonomi, kontribusi dari penelitian yang diteliti dalam kontribusi modernisasi alutsista dan

pemenuhan Minimum Essential Force tersebut diantaranya adalah tercapainya 1 dari tujuh program prioritas industri pertahanan nasional melalui kerjasama pengadaan kapal selam *Changbogo Class 209/1400*, kapal selam sendiri dijadikan prioritas karena dianggap sebagai alutsista yang memiliki tingkat teknologi tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari dipenuhinya 60 persen pemenuhan MEF periode dua dari target awal 62 persen dalam 5 tahun terakhir. Dimana didalamnya ada kerjasama pengadaan kapal selam, pesawat tempur, dan pesawat *trainee Aircraft*.

Selain itu, melalui kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam pemberian lisensi terhadap produk kerjasama *Landing Platform dock* juga menguntungkan Indonesia yaitu dalam segi ekspor dimana Indonesia sendiri telah mengekspor LPD pesanan filipina yang diberi nama *Makassar Class*.

Peneliti sendiri memberikan rekomendasi dimana Indonesia kedepannya harus lebih serius dalam penganggaran belanja pertahanan kedepannya, khususnya dalam mencapai master plan kemandirian industri pertahanan. Anggaran tersebut tentunya akan berimplikasi meningkatnya ekspor karena industri pertahanan dapat mengembangkan dan memproduksi lebih banyak alpanhankan. Indonesia juga harus lebih selektif dalam kerjasama pengadaan alutsista yang berkiblat kepada kebutuhan MEF serta sesuai dengan UU no 16 tahun 2012, dan melihat kerjasama yang paling menguntungkan bagi indonesia, tidak mengikuti keinginan broker-broker yang justru merugikan Indonesia kedepannya, dan terakhir Indonesia sendiri harus lebih serius dalam pengawasan jalanya Transfer of Technology pesawat tempur KFX serta pengawasan untuk mendapatkan lisensi baik untuk pesawat KFX maupun untuk Kapal Selam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bakrie, U. S. (1999). *Pengantar Hubungan Internasional*. Bekasi: Jayabaya University Press.
- Departemen Pertahanan RI. (2015). *Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia 2015*. Dephan RI (p. 18). Jakarta: Departemen Pertahanan RI.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2014). *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan Edisi Kelima*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syawfi, I. (2009). *Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Memenuhi Tujuan-Tujuan Pertahanan Indonesia (2003-2009)*. Jakarta: Universitas Indonesia.

### Jurnal

- Sudira, N., Kartasmita, G., Syawfi, I., & Dewi, D. (2022). Fusi Sipil-Militer dalam Pengembangan Industri Pertahanan: Studi Perbandingan Amerika Serikat, Tiongkok, dan India. *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNPAR*.

### Internet

- Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan. (2019). *Laporan Ditjen Potan Tahun 2018*. Retrieved from Kementerian Pertahanan: [https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2019/01/LaptahPotan2018\\_Final.pdf](https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2019/01/LaptahPotan2018_Final.pdf)

- Kompas.com. (2017). *Ini Kehebatan Kapal Selam Baru KRI Nagapasa 403 Milik TNI* . Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/28/20422671/ini-kehebatan-kapal-selam-baru-kri-nagapasa-403-milik-tni-al?page=all>
- Kompas.com. (2019, Januari 18). *Proyek Pesawat Tempur KF-X dan Hegemoni Korsel atas Indonesia*. Retrieved from Nasional Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/18/15403971/proyek-pesawat-tempur-kf-x-dan-hegemoni-teknologi-korsel-atas-indonesia?page=all>.
- Kompas.com. (2021, Oktober 12). *Perang Korea 1950: Bagaimana Akhirnya dan Kenapa Korsel-Korut Tidak Bersatu*. Retrieved from International Kompas: <https://internasional.kompas.com/read/2021/10/12/130000570/perang-korea-1950--bagaimana-akhirnya-dan-kenapa-korsel-korut-tidak?page=all>
- Merdeka.com. (n.d.). *Ini Alasan Pemerintah Beli Kapal Selam dari Korea Selatan*. Retrieved from <https://www.merdeka.com/uang/ini-alasan-pemerintah-beli-kapal-selam-dari-korea-selatan.html>